

TAX PLANNING IN TERMS OF THE CHOOSING OF THE DEPRECIATION METHOD OF FIXED ASSETS

(CASE STUDY ON JASA TIRTA 1 MALANG)

By Winda Aulinda

Supervising Professor: Devy Pusposari, M.Si, Ak.

ABSTRACT

The research examines how the Indonesian Financial Accounting Standards Report Number 16 (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan / PSAK- 16) is implemented, the extent to which the selection of fixed assets depreciation method influences tax planning, and how such a selection affects the financial reports of Perum Jasa Tirta (PJT) 1 Malang. This case study applies deskriptif quantitative method. The result of the analysis shows that PSAK-16 has been implemented very well in PJT-1. The tax planning of the selection of fixed assets depreciation method, however, is not optimally administered yet. Whereas, the method selection influences the amount of depreciation expense as stated in the company's profit and loss statement.

Key words: Depreciation expense of fixed assets , Depreciation methods, Tax planning, Deferred tax asset.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang bagaimana penerapan PSAK 16, bagaimana pemilihan metode penyusutan aset tetap memberikan pengaruh terhadap perencanaan perpajakan, dan bagaimana pemilihan metode penyusutan aset tetap memberikan pengaruh terhadap laporan keuangan Perum Jasa Tirta 1 Malang. Metodologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PSAK 16 pada PJT sudah baik. Namun, perencanaan pajak pada pemilihan metode penyusutan aset tetap belum dilakukan secara optimal. Sedangkan pemilihan metode penyusutan berdampak pada besar kecilnya pembebanan biaya penyusutan dalam laporan keuangan yaitu pada laporan laba rugi perusahaan.

Kata kunci: beban penyusutan aset tetap, metode penyusutan, perencanaan pajak, aset pajak tangguhan.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perum Jasa Tirta (PJT) 1 Malang sebagai salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melakukan kegiatan usaha, harus memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan (Sumarsan, 2012). Menurut Zain (2005) salah satu kewajiban perpajakan yaitu membayar pajak terutang Wajib Pajak (WP). Sebagai wajib pajak yang akan memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, efisien dan efektif, sebaiknya perusahaan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*).

Perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan terkait dengan potensi pajak, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konskuensi pajaknya. Adapun salah satu strateginya adalah *tax shifting*. *Tax shifting* adalah penggeseran beban pajak baik pada waktu maupun subjeknya. *Tax shifting* terbagi menjadi dua yaitu pergeseran ke depan (*forward shifting*) dan pergeseran ke belakang (*backward shifting*). Contohnya adalah percepatan pengakuan biaya penyusutan dengan metode saldo menurun (Pohan, 2003). Penyusutan yang dipercepat dapat meningkatkan arus kas, karena apabila nilai penyusutan besar, maka pajak yang dibayarkan akan lebih kecil (Suandy, 2011).

Sebagai BUMN dengan kegiatan usaha luas yang meliputi pelayanan air baku untuk air minum, industri, pertanian, penggelontoran, pelabuhan, pembangkit tenaga listrik, pemenuhan kebutuhan air lainnya, dan akan melakukan pengembangan usaha secara berkelanjutan tentu aset tetap yang dimiliki PJT merupakan salah satu faktor pendukung dalam menunjang usaha tersebut. Hal ini terbukti dari laporan posisi keuangan PJT pada tahun 2015, aset yang dimiliki sangatlah material yaitu sebesar Rp.150.364.200.000,- atau 32% dari total asetnya, sehingga pembebanan biaya penyusutan berpengaruh terhadap laporan keuangan yang disajikan perusahaan

Mengingat peran penting aset tetap bagi PJT, sudah semestinya perlakuan akuntansi atas penyusutan aset tetap harus disesuaikan dengan standar yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang, antara lain: Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Standar Akuntansi Keuangan No 16 tahun 2011 tentang aset tetap, Pemerintah melalui Undang-Undang perpajakan atas beban penyusutan yang merupakan komponen pengurang laba menurut fiskal (*deductible expense*), dan PSAK 46 tahun 2014 terkait pajak penghasilan.

Terdapat perbedaan antara laporan keuangan akuntansi dan perpajakan. Perbedaan tersebut karena

dalam penyusunan laporan keuangan standar akuntansi lebih memberikan keleluasaan bagi manajemen dalam menentukan prinsip dan estimasi akuntansi dibandingkan dengan peraturan perpajakan. Perbedaan ini menyebabkan selisih perhitungan laba menurut akuntansi dan fikal. Menurut Mills (2011) semakin besar motivasi manajemen untuk melakukan manajemen laba maka semakin besar pula perbedaan antara laba akuntansi dengan laba perpajakan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin memahami lebih jauh mengenai kebijakan akuntansi aset tetap yang diterapkan Perum Jasa Tirta I Malang dan apakah metode penyusutannya yang diterapkan perusahaan berpengaruh terhadap penghematan pajak dan laporan keuangan. Sehingga dengan permasalahan tersebut, peneliti memilih judul “Perencanaan Pajak Ditinjau dari Pemilihan Metode Penyusutan Aset Tetap, Studi Kasus Pada Perum Jasa Tirta 1 Malang”.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam kaitannya dengan latar belakang tersebut di atas, maka perlu diadakan perumusan masalah yang akan menjadi dasar penelitian, yaitu:

1. Bagaimana penerapan PSAK 16 tentang aset tetap pada Perum Jasa Tirta 1 Malang?

2. Bagaimana pemilihan metode penyusutan aset tetap (garis lurus atau saldo menurun) memberikan pengaruh terhadap perencanaan perpajakan pada Perum Jasa Tirta 1 Malang?
3. Bagaimana pemilihan metode penyusutan aset tetap (garis lurus atau saldo menurun) memberikan pengaruh terhadap Laporan Keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAK 16 tentang aset tetap pada Perum Jasa Tirta 1 Malang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemilihan metode penyusutan aset tetap memberikan pengaruh terhadap perencanaan perpajakan pada Perum Jasa Tirta 1 Malang.
3. Untuk mengetahui bagaimana pemilihan metode penyusutan aset tetap memberikan pengaruh terhadap laporan keuangan Perum Jasa Tirta 1 Malang.

II. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Sukmadinata (2011) penelitian

deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau, penggambaran dilakukan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai pelaksanaan penyusutan aset tetap dan beban pajak penghasilan yang dibayarkan Perum Jasa Tirta 1 pada tahun 2015. Penggunaan metode kuantitatif berguna untuk menganalisis dan menginterpretasikan data terkait tahun perolehan aset, nilai perolehan, umur ekonomis, dan beban penyusutan aset tetapnya. Ditinjau dari segi masalah yang diselidiki, teknik dan alat yang digunakan dalam meneliti, serta tempat dan waktu peneliti memilih studi kasus sebagai penelitiannya.

2.2 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada Perum Jasa Tirta 1 Malang yang berlokasi di Jalan Surabaya No.2 Malang.

2.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara beberapa pegawai Perum Jasa Tirta di bagian pengelolaan aset dan pengadaan barang, keuangan dan pajak. Sedangkan data sekunder diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara yang berupa laporan keuangan yang didapat dari

website resmi perusahaan dan daftar inventaris aset tetap Perum Jasa Tirta 1 yang didapat dari dokumentasi *file* pegawai di bagian pengelolaan aset dan pengadaan barang.

2.4 Tahapan Analitis

Analisis yang dilakukan dengan membuat model perencanaan pajak terkait biaya penyusutan yang digunakan Perum Jasa Tirta dengan metode yang diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun cara yang digunakan peneliti ialah:

1. Mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian yaitu daftar aset tetap baik pengakuan harga perolehan, umur ekonomis, nilai residu, metode dan daftar penyusutan aset tetap, serta peraturan-peraturan yang digunakan perusahaan terkait pengelolaan penyusutan aset tetapnya.
2. Mereduksi data dengan memilih data yang penting dan memfokuskan pada hal-hal pokok. Proses pemilihan dan pemusatan perhatian data ini dilakukan dengan cara memilah kategori aset tetap sesuai kriteria batasan penelitian ini yaitu aset tetap pada bagian operasional perusahaan yang berkaitan langsung dengan kondisi atau faktor alam.

3. Melakukan perhitungan penyusutan aset tetap dengan menggunakan metode garis lurus dan saldo menurun baik secara komersial maupun fiskal, hal ini dilakukan karena perbedaan umur ekonomis di keduanya.
4. Membandingkan pengakuan penyusutannya aset tetap yang digunakan perusahaan dengan Standar Akuntansi Keuangan No.16 yaitu pengakuan biaya, umur ekonomis, dan nilai residu sari aset tersebut.
5. Dari hasil perhitungan penyusutan aset tetap dengan menggunakan metode garis lurus dan saldo menurun tadi, peneliti mengkaitkan hasil analisis tersebut kedalam PSAK 46 tentang pajak penghasilan yang difokuskan terhadap pengakuan aset pajak tangguhan karena adanya perbedaan temporer yang diakui komersial maupun fiskal.
6. Menganalisis dampak dari pemilihan metode penyusutan aset tetap Perum Jasa Tirta 1 Malang terhadap laporan keuangan.
7. Menarik kesimpulan dari hasil perhitungan penyusutan aset tetap Perum Jasa Tirta 1 Malang dengan menggunakan metode garis lurus dan saldo menurun yang bernilai lebih tinggi sebagai salah satu praktek

perencanaan pajak yaitu percepatan pengakuan biaya.

2.5 Validitas Data

Pada penelitian diperlukan uji validitas data dalam rangka menghasilkan kebenaran data yang objektif. Pada penelitian kualitatif validasi data mengacu pada apakah temuan penelitian secara akurat mencerminkan situasi sesungguhnya yang didukung oleh bukti. Triangulasi adalah teknik mencari pertemuan pada satu titik dengan tujuan untuk melakukan pengecekan dan membandingkan sekumpulan data yang sudah diperoleh. Adapun triangulasi yang dilakukan peneliti adalah melakukan pengumpulan data dari orang-orang berbeda namun melakukan aktivitas sama yaitu wawancara. Selain itu peneliti juga peneliti menghubungkan dan saling mengkonfirmasi data dari temuan tersebut dengan data inventaris aset tetap Perum Jasa Tirta 1 Malang dan Laporan Tahunannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Penyusutan Berdasarkan PSAK No. 16

Perum Jasa Tirta 1 menggunakan metode garis lurus dalam menaksir beban penyusutannya hal tersebut telah sesuai dengan PSAK 16. Metode garis lurus digunakan atas dasar kemudahan dalam menghitung

besarannya karena perusahaan menggunakan program sederhana yaitu *Microsoft Excel*, selain itu metode garis lurus ini menghasilkan beban penyusutan yang jumlahnya sama setiap periode. Dengan karakteristik aset tetap seperti yang dimiliki oleh PJT serta laba yang selalu meningkat, maka penggunaan metode saldo menurun lebih menguntungkan karena akan memperkecil beban pajak perusahaan pada tahun berjalan. Dengan beban pajak yang kecil pada tahun berjalan PJT dapat mengalokasikan *cash flow* untuk tujuan investasi (*opportunity cost*) lainnya.

Aset tetap yang di sajikan Perum Jasa Tirta 1 Malang pada laporan keuangan dilaporkan secara bersih. Aset tetap bersih merupakan penilaian yang berdasarkan harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Selain itu PJT juga telah menyajikan dan mengungkapkan aset tetapnya secara tepat sesuai dengan menerapkan PSAK 16 sebagai dasar pengungkapan aset tetap dalam laporan keuangannya. Perusahaan mengungkapkan seluruh aset tetap dalam laporan keuangannya. Dalam catatan atas laporan keuangannya, Perum Jasa Tirta 1 Malang mengungkapkan:

a. Metode penyusutan yang digunakan

- b. Dasar pengukuran harga perolehan
- c. Dasar pengukuran setelah pengakuan awal
- d. Umur ekonomis dan tarif penyusutan yang digunakan
- e. Nilai residu
- f. Penghentian pengakuan asset

Namun berdasarkan wawancara bea impor pembelian aset tetap tidak dikapitalisasi dengan harga perolehan suatu barang aset tetap akan berpengaruh pada laporan keuangan yaitu besarnya aset yang dimiliki perusahaan serta tingginya beban operasional perusahaan terkait pembebanan langsung bea import pada tahun pembelian. Selain itu PJT juga tidak melakukan review terhadap umur ekonomis, nilai residu, dan metode penyusutan yang digunakan, sehingga hal tersebut dapat berdampak pada kurang andalnya laporan keuangan yang disajikan.

3.2 Analisis Perencanaan Perpajakan untuk Penyusutan

Perencanaan perpajakan pada pemilihan metode penyusutan aset tetap dapat dilakukan dengan membandingkan hasil perhitungan penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus dan saldo menurun, selanjutnya mengkaitkan hasil perhitungan tersebut dengan nilai waktu dari uang (*time value of money*) sehingga terlihat

penghematan pajak dari kedua metode tersebut, adapun perhitungannya sebagai berikut.

Tahun	Keterangan	Garis Lurus	Saldo Menurun	Selisih
2013	Laba Sebelum Penyusutan	82.454.740.539	82.454.740.539	-
	Beban Penyusutan	2.791.301.261	4.901.101.692	2.109.800.431
	Pph Badan Terkait	19.915.859.820	19.388.409.712	527.450.108
2014	Laba Sebelum Penyusutan	82.832.156.000	82.832.156.000	-
	Beban Penyusutan	4.203.964.860	5.558.535.553	1.354.570.693
	Pph Badan Terkait	19.657.047.785	19.318.405.112	338.642.673
2015	Laba Sebelum Penyusutan	95.465.657.321	95.465.657.321	-
	Beban Penyusutan	6.698.945.221	9.697.090.977	2.998.145.756
	Pph Badan Terkait	22.191.678.025	21.442.141.586	749.536.439

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dengan metode saldo menurun, beban pajak penghasilan semakin besar sehingga laba setelah pajak Perum Jasa Tirta 1 Malang semakin kecil. Hal tersebut merupakan salah satu cara perencanaan pajak yaitu dengan memaksimalkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan dengan laba, serta dengan percepatan pembebanan biaya sebagai strategi efisiensi untuk

menekan beban pajak perusahaan. Percepatan pembebanan biaya penyusutan aset tetap dilakukan agar menggeser waktu pembayaran pajak (*forward shifting*). *Forward shifting* ini dilakukan dengan pengakuan biaya yang lebih besar diawal karena beban merupakan pengurang pph terutang. Perencanaan pajak yang dilakukan dengan cermat akan memberikan manfaat yaitu penghematan kas keluar,

karena beban pajak merupakan unsur biaya yang dapat dikurangkan dengan laba fiskal, sehingga perusahaan dapat

mengatur aliran kas (*cash flow*) dan menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

Tahun	Garis Lurus		Saldo Menurun	
	Nilai nominal	PV	Nilai nominal	PV
2013	2.791.301.261	7.365.593.458	4.901.101.692	12.932.865.063
2014	4.203.964.860	7.632.568.576	5.558.535.553	10.091.878.787
2015	6.698.945.221	6.278.299.176	9.697.090.977	9.088.182.734
		21.276.461.210		32.112.926.583

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan metode saldo menurun dalam mengakui beban penyusutan aset tetap memberikan

3.3 Dampak Pemilihan Metode Penyusutan Aset Tetap terhadap Laporan Keuangan.

Berdasarkan analisa dan olah data diatas, beban penyusutan besar kaitannya dengan laporan keuangan perusahaan. Pengakuan benar tidaknya harga perolehan aset tetap berpengaruh pada besarnya aset tetap pada kelompok harta tidak lancar atau aset yang dimiliki suatu perusahaan. Sedangkan pemilihan metode penyusutan berdampak pada besar

penghematan pajak yang terlihat dari nilai waktu dari uang yang berbeda pada kedua metode.

kecilnya pembebanan biaya penyusutan dalam laporan keuangan yaitu pada laporan laba rugi perusahaan. Selain itu perbedaan pengakuan antara perpajakan dan komersial perusahaan harus menerapkan PSAK No.46 yang menyebabkan adanya pengakuan aset pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan pada laporan posisi keuangan perusahaan. Selain itu juga diakuinya beban pajak tangguhan dan penghasilan pajak tangguhan pada laporan laba rugi.

PENUTUPAN

4.1 Simpulan

1. Perlakuan awal aset tetap pada Perum Jasa Tirta 1 Malang masih belum sesuai dengan PSAK No.16 hal ini dikarenakan perusahaan tidak mengakui biaya impor pembelian aset tetap aset sebagai biaya perolehan awal. Selain itu PJT tidak melakukan *review* kembali pada tahun akhir buku mengenai metode penyusutan yang digunakan, nilai residu dan umur ekonomis asetnya.
2. Perum Jasa Tirta 1 Malang menggunakan metode penyusutan garis lurus untuk mengakui penyusutan aset tetapnya. Hal ini dikarenakan atas dasar kemudahan dalam menghitung besarnya karena PJT menggunakan program sederhana yaitu *Microsoft Excel* dan besaran nilai manfaat yang dibebankan dari aset sama setiap tahunnya. Penggunaan metode penyusutan garis lurus pada PJT dengan laba yang selalu meningkat dan selalu melakukan pembelian aset tetap disetiap tahun, mengakibatkan beban penyusutan yang diakui ditahun berjalan terlalu kecil. Pembebanan biaya penyusutan yang terlalu kecil dapat

mengakibatkan lebih besarnya pajak yang harus dibayarkan PJT.

3. Pemilihan metode penyusutan berdampak pada besar kecilnya pembebanan biaya penyusutan dalam laporan keuangan yaitu pada laporan laba rugi perusahaan. Pada penerapan PSAK No. 16 mengenai pengakuan benar tidaknya harga perolehan aset tetap berpengaruh pada besarnya aset tetap pada kelompok harta tidak lancar atau aset yang dimiliki suatu perusahaan. Selain itu perbedaan pengakuan antara perpajakan dan komersial perusahaan harus menerapkan PSAK No.46 yang menyebabkan adanya pengakuan aset pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan pada laporan posisi keuangan perusahaan. Selain itu juga diakuinya beban pajak tangguhan dan penghasilan pajak tangguhan pada laporan laba rugi.

4.2 Saran

1. Perusahaan hendaknya mengakui biaya perolehan akan aset tetap sesuai dengan biaya terkait untuk memperoleh aset tersebut sesuai PSAK No. 16 tentang aset tetap yaitu menkapitalisasi biaya impor

pembelian aset tetap menjadi biaya perolehan. Selain itu PJT hendaknya melakukan penilaian kembali terhadap metode penyusutan, umur ekonomis, dan nilai residu pada setiap akhir tahun buku masing-masing aset tetapnya.

2. Melihat hasil perhitungan penyusutan aset tetap dikedua metode, karakteristik aset tetap, dan tingkat laba yang selalu meningkat, sebaiknya PJT mengakui penyusutannya dengan menggunakan saldo menurun. Perubahan metode penyusutan menurut IAI haruslah diakui secara

prospektif sesuai PSAK No. 25. Selain itu perubahan metode penyusutan dalam pajak haruslah atas persetujuan Direktorat Jenderal Pajak karena pada dasarnya metode pembukuan yang dianut harus taat asas taat asas, yaitu harus sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Persetujuan pada Direktorat Jenderal Pajak dilakukan sebelum dimulainya tahun buku yang bersangkutan dengan menyampaikan alasan yang logis dan dapat diterima serta akibat yang mungkin timbul dari perubahan tersebut (Muljono, 2012).

Daftar Pustaka

- Bieman, H. (1993). *The Capital Budgeting Decision Economic Analysis of Investment Projects Ed. 8*. New York: Macmillan Publishing.
- Dendawijaya, Lukman, 2003. Manajemen Perbankan, Cetakan Kedua, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia
- Hansen, D. R., & Mowen, M. M. (2009). *Akuntansi Manajerial*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2009. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 25 Tentang Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan. Jakarta: IAI
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2011. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 Tentang Aset Tetap. Jakarta: IAI
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2014. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta: IAI
- Irreza. (2012). Penggunaan Komponen Pembentuk Pajak Tangguhan Dalam Mendeteksi Manajemen Laba. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* , 68 - 82.
- Magananda, G. (2007). Perencanaan Pajak Melalui Metode Penyusutan dan Revaluasi Aktiva Tetap untuk Meminimalkan Beban Pajak Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan GM). *Skripsi*, 46-52.
- Martani, D. (2016, Desember 23). Akuntansi Aset Tetap (PSAK 16) dan PSAK Terkait. *Dwi Martani Accounting and Finance Corner* diakses dari <https://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2017/02/ED-AI-PSAK-16-07-Sept-2015.pdf>
- Menteri Keuangan. 2009. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 Tentang Jenis-Jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan. Sekretariat Negara. Jakarta.

- Mills, L. a. (2001). *The Influence of Tax and Non-Tax Cost on Book-tax Reports Rifferences: Public and Private Firms.* . The Journal of the American Taxation Association.
- Muljono, D. (2012). *Pengaruh Perpajakan pada Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.* Yogyakarta: Andi.
- Pardiat. (2008). *Akuntansi Pajak Lanjutan.* Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Patton, M. Q. (2001). *Qualitative Research and Evaluation Methods* . Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Pohan, C. A. (2003). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pradana, Y. (2015). Penerapan PSAK No. 16 Tentang Aset Tetap Pada PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) PG Soedhono Ngawi. *Skripsi*, 112-113.
- Republik Indonesia. 2000. Undang-Undang No.17 Pasal 11 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, Kelompok, Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan Aset Tetap Berwujud. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang No 36 Pasal 11 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Siagian, S. P. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Jakarta: Radar Jaya Offset.
- Suandy, E. (2011). *Perencanaan Pajak.* Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan.* Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sulistyawati, F. (2008). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Dinas Pendapatan Kota Malang). *Skripsi*, 75-76.
- Sumarsan, T. (2012). *Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak.* Jakarta: Indeks.
- Suryo, B. (3 April 2014). *Debit Air Sejumlah Bendungan di Jatim Merosot.* Malang: Metrotvnews.com.
- Ulum, I. (2016). *Metode Penelitian Akuntansi Klinik Skripsi Edisi 2.* Malang: Aditya Media Publishing.

Waluyo. (2010). *Akuntansi Pajak Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.

Zain, M. (2005). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.